

**DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PENERBITAN
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG TENTANG
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Oleh

DESTI NADILA REO

21310138

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desti Nadila Reo

NIM : 21310138

Alamat : Jln. Kelapa Gading. RT 038 RW 012, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, Agustus 2025

Penulis



Desti Nadila Reo

21310138

PENGESAHAN

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

Pembimbing I



Soleman Kette, SH., M.Hum
NUPTK. 9152739640130063

Pembimbing II



Jeremia Alexander Wewo, SH., MH
NUPTK.6137770671130343



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM
Jl. Adisucipto P.O.BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62 380 881677
Email: admind@ukaw.ac.id/ukaw-kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA UJIAN

Pada hari ini Sabtu, 09 (sembilan) Agustus 2025 (dua ribu dua puluh lima), bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah diselenggarakan ujian sarjana dengan susunan penguji :

PANITIA PEGUJI

Ketua : Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H.,M.Hum
Sekertaris : Liven E. Rafael, S.H.,M.Hum
Anggota : 1. Soleman Kette, S.H.,M.Hum
2. Jeremia A. Wewo, S.H.,MH
3. Rian V. F. Kapitan, S.H.,M.H

TANDA TANGAN

Kupang, 09 Agustus 2025

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H.,M.Hum
NUPTK. 7862752653130072

MOTTO

**“TETAPI CARILAH DAHULU KERAJAAN ALLAH DAN
KEBENARANNYA, MAKA SEMUANYA ITU AKAN DITAMBAHKAN
KEPADAMU”**

MATIUS 6:33

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus sumber segala hikmat dan akal budi yang selalu menuntun dan menyertai sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Orang tua tercinta, Bapa Aminadab Reo dan Mama Bertha Taku Neno, yang selalu mendukung dan mendoakan, sehingga saya sampai tahap ini.
3. Saudara-saudari yang tercinta, kakak Sefera R. Taku Neno, kakak Dizyan B. Taku Neno, kakak Jitro Reo, kakak Melania B. Reo, yang telah mendukung dan mendoakan.
4. Teman-teman seangkatan Tahun 2021 yang juga turut memberi dukungan baik moril maupun materil, terimah kasih atas kerja samanya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik.
5. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, terkhususnya Fakultas Hukum, karya ini sebagai tanda terimah kasih saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena atas anugerah dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Tentang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ”.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr.Ir Godlief Frederik Neonufa, MT, Selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah menerima dan mengijinkan Penulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Yanto M.P Ekon S.H., Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Liven E. Rafael, SH., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Tonji Ch. Rafael, SH.,M.H, Selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
5. Bapak Soleman Kette, SH., M.Hum. Selaku dosen pembimbing I (satu) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

6. Bapak Jeremia Alexander Wewo, S.H., MH, selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
8. Bapak Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu administrasi selama perkuliahan.

Pada akhirnya penulis mengucapkan limpah terimakasih kepada seluruh pihak atas dukungan dan doa kepada penulis dalam meraih cita-cita dan masa depan, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua.

Kupang, Agustus 2025

Penulis

Desti Nadila Reo

21310138

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBARAN PENGESAHAN

BERITA ACARA

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... 5

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. RUMUSAN MASALAH 11

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 11

1. Tujuan Penelitian..... 11

2. Kegunaan Penelitian..... 12

D. KEASLIAN PENELITIAN 12

E. METODE PENELITIAN..... 14

1. Sifat Penelitian..... 14

2. Jenis Penelitian 15

3. Variabel Penelitian 15

4. Sumber Data 16

5. Teknik Pengumpulan Data 18

6. Analisis Data..... 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Perizinan.....	19
B. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	24
C. Proses Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara	31
D. Upaya Hukum	45
BAB III DESKRIPSI DAN ANALISIS PENELITIAN	54
A. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN	54
B. ANALISIS HASIL PENELITIAN	89
BAB IV PENUTUP	108
A. KESIMPULAN	108
B. SARAN	109
DAFTAR PUSTAKA	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	112

ABSTRAK

Judul: Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Penerbitan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Tentang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Rumusan Masalah: 1). Mengapa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat?, 2). Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima?. Tujuan: 1). Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat, 2). Untuk Mengetahui alasan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima. Sifat Penelitian adalah deskriptif yaitu penulis menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan yang mengabulkan gugatan pengugat sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima dalam sengketa Penerbitan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Tentang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Variabel adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel Bebas dalam penelitian ini adalah: alasan hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan penggugat sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima pada sengketa Penerbitan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Tentang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah: putusan Hakim dalam penyelesaian sengketa Penerbitan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Tentang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder.

Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis lakukan maka: 1). Alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Hakim Mahkamah Agung megabulkan gugatan penggugat adalah: Karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya berupa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengandung cacat yuridis dan terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. 2). Alasan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima adalah: Karena gugatan yang diajukan penggugat mengandung cacat formil berupa Gugatan yang diajukan oleh penggugat telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh hari). Saran dari penulis yaitu: 1). Kepada setiap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam menerbitkan suatu keputusan Tata Usaha Negara agar selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan dari Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur, Aspek Substansi dan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik; 2). Hakim dalam menjatuhkan putusan harus lebih mencermati tentang tenggang waktu agar tidak salah dan keliru dalam nenerapkan hukum.

Kata Kunci: Menteri Agraria dan Tata Ruang, Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang

ABSTRACT

Title: Description of the Settlement of Disputes Regarding the Issuance of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning's Decree on the Approval of the Conformity of Spatial Utilization Activities. **Problem Formulation:** 1). Why did the judges of the Administrative Court and the Supreme Court grant the plaintiff's lawsuit?, 2). Why did the judges of the High Administrative Court declare the plaintiff's lawsuit inadmissible?. **Objectives:** 1). To understand the reasons why the judges of the Administrative Court and the Supreme Court granted the plaintiff's lawsuit. 2). To understand the reasons why the judges of the High Administrative Court declared the plaintiff's lawsuit inadmissible. The nature of this research is descriptive, meaning the author explains, illustrates, and elaborates on the reasons why the panel of judges at the Administrative Court and the Supreme Court issued decisions in favor of the plaintiff, while the panel of judges at the High Administrative Court declared the plaintiff's lawsuit inadmissible in the dispute over the issuance of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning's Decree on the Approval of the Conformity of Spatial Utilization Activities. This type of research uses normative legal research. The variable refers to the core issues being examined. **Independent Variable:** The reasons why the judges at the Administrative Court and the Supreme Court issued rulings in favor of the plaintiff, while the High Administrative Court declared the plaintiff's lawsuit inadmissible in the dispute over the issuance of the Minister's Decree on the Approval of the Conformity of Spatial Utilization Activities. **Dependent Variable:** The judge's ruling in settling the dispute over the issuance of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning's Decree on the Approval of the Conformity of Spatial Utilization Activities. The types and sources of data used in this research are secondary data.

Based on the results of the research conducted by the author: 1). The reason the judges of the Administrative Court and the Supreme Court granted the plaintiff's lawsuit is because the plaintiff was able to prove the arguments in the claim, namely that the lawsuit was filed within the 90 (ninety) day time limit, and that the State Administrative Decree issued by the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency contained legal defects and was proven to contradict prevailing laws and regulations as well as the General Principles of Good Governance. 2). The reason the judges of the High Administrative Court declared the plaintiff's lawsuit inadmissible is because the lawsuit submitted by the plaintiff contained a formal defect, namely that the claim was submitted after the 90 (ninety) day time limit had passed. **Suggestions from the author:** 1). Every State Administrative Agency or Official, in issuing a State Administrative Decree, should always consider the applicable laws and regulations in terms of authority, procedure, substance, and the General Principles of Good Governance. 2). Judges, in issuing rulings, must pay closer attention to the time limits so as to avoid errors in the application of the law.

Keywords: Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning, Approval of Spatial Utilization Activities

